

TESIS

**PEMBATASAN HONORARIUM NOTARIS MENURUT
ASPEK ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**

(Suatu Kajian Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris)



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal, Februari 2026

Oleh Dosen Pembimbing :



Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama



Dr. Habib Adjie S.H., M.Hum

LEMBAR PERSETUJUAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI SEMINARKAN
PADA TANGGAL 5 FEBRUARI 2026**

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Erma Zahro Noor, S.H., M.H.



Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Narotama



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

TESIS

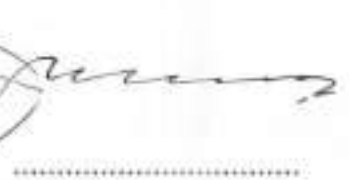
PADA TANGGAL : 5 FEBRUARI 2026

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

Anggota : Dr. ERMA ZAHRO NOOR S.H., M.H.
PRO PATRIA

: Dr. TAHEGGA PRAMANANDA A S.H., M.H



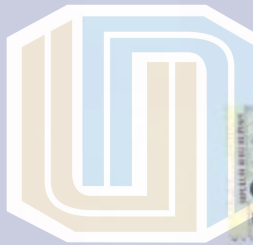
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, Februari 2026

Yang membuat pernyataan



PRO PATRIA



ALFARIDO MOEZZAD OLIVER

NIM : 12223062

RINGKASAN

PEMBATASAN HONORARIUM NOTARIS MENURUT ASPEK ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

(Suatu Kajian Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris)

BAB I, pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan dengan manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

BAB II Membahas rumusan masalah pertama yaitu dengan judul bab Pembatasan Maksimum Honorarium Notaris Koheren Dengan Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pada bab ini membahas koherensi antara pembatasan honorarium notaris dalam Pasal 36 Undang – Undang Jabatan Notaris dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, serta alasan hukum dan sosial mengapa pembatasan tersebut dianggap sah dan diperlukan.

BAB III Pembahasan atas rumusan yang kedua yaitu dengan judul Notaris Memiliki Hak Tagih Terhadap Penghadap Yang Tidak Membayar Honorarium Atas Jasa Kenotariatan Yang Telah Diberikan. Bab ini membahas Hak notaris untuk menagih biaya dari klien yang tidak membayar muncul karena ada hubungan kontraktual antara notaris dan klien. Walaupun demikian, jika klien tidak mampu membayar, itu tidak mempengaruhi keabsahan dokumen yang dibuat, tetapi memberi notaris alasan untuk melakukan penagihan, baik melalui jalur hukum maupun administratif.

BAB IV Merupakan bagian terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran untuk semua isu permasalahan yang telah dibahas dalam bab dua dan tiga. Setiap bab diharapkan dapat menghasilkan ringkasan yang disusun secara teratur dan objektif. Dengan demikian, diharapkan terbentuk sebuah kesimpulan yang utuh, singkat, dan padat. Akhirnya, beberapa saran akan direkomendasikan berdasarkan hasil kesimpulan yang telah ada.



ABSTRAK

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan prinsip fundamental dalam pembentukan perjanjian, termasuk dalam hubungan hukum antara notaris dan para penghadap. Namun, Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur batas minimum dan maksimum honorarium notaris, yang secara normatif berpotensi membatasi ruang kesepakatan para pihak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai koherensi antara pembatasan honorarium tersebut dengan asas kebebasan berkontrak. Selain itu, dalam praktik sering timbul permasalahan ketika penghadap tidak membayar honorarium meskipun notaris telah memberikan jasa, sehingga memunculkan isu mengenai ada atau tidaknya hak tagih notaris dalam konteks perikatan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal utama: (1) koherensi pembatasan maksimum honorarium notaris dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan (2) kedudukan serta dasar hukum hak tagih notaris terhadap penghadap yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran honorarium. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, asas hukum, dan analisis konseptual.

Kata kunci : Notaris, Asas Kebebasan Berkontrak, Honorarium, koherensi, Hak Tagih.

ABSTRACT

The principle of freedom of contract, as stipulated in Article 1338 of the Civil Code , is a fundamental principle in forming agreements, including in the legal relationship between notaries and their witnesses. However, Article 36 of the Notary Law stipulates minimum and maximum limits on notary fees, which, in normative terms, has the potential to limit the parties' scope for agreement. This raises questions about the coherence between these fee restrictions and the principle of freedom of contract. Furthermore, in practice, problems often arise when the witness fails to pay the fee even though the notary has provided services, raising the issue of whether or not the notary has a right to collect in the context of a service agreement. This study aims to analyze two main issues: (1) the coherence of the maximum limit on notary fees in Article 36 of the of the Notary Law with the principle of freedom of contract in Article 1338 of the Civil Code; and (2) the status and legal basis of a notary's right to collect against witnesses who fail to fulfill their obligation to pay their fees. The research was conducted using a normative juridical method with a statutory approach, legal principles, and conceptual analysis.

Keywords: *Notary, Freedom of Contract, Honorarium, Incoherence, Right to Collect.*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, anugerah, dan penyertaan-Nya yang sempurna, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik. Segala hikmat, kekuatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan telah menopang penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan judul : **“PEMBATASAN HONORARIUM NOTARIS MENURUT ASPEK ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (Suatu Kajian Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris)”**. Yang disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Penulis tesis ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Arasy Alimmudin, S.E., M.M, sebagai Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
4. Dr. Erma Zahro Noor, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing sejak awal sampai tesis ini terselesaikan dengan baik.
5. Semua Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
6. Staf Tata Usaha dan rekan - rekan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan penulisan Tesis ini.

7. Kedua orangtua tercinta Bapak Olivier Alberth dan ibunda Arexa Theresia Ang Djadi, Ketiga saudara saya Mesakh Yun Muhamad, Linda Muhamad, dan Mizzel Abigail Olivier, para sepupu,serta keluarga besar Olivier - Muhammad Serta seluruh rumpun keluarga besar yang telah banyak memberikan perhatian, semangat dan dukungan baik berupa dukungan moral maupun materil dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kekasih tercinta Sarciana Messakh, A.Md.Keb. Terima kasih untuk segala support, motivator, guru dan semangatnya sampai dengan penyelesaian tesis ini.
9. Teman-Teman Magister Kenotariatan angkatan-27 Universitas Narotama Surabaya yang tidak dapat saya sebutkan satu – persatu.
10. Tim rumah pink, khususnya Bapa Niko Bifel, Ma Oi, Ka Ambros, Ka Sari, Ka Riko, Ka Alto, Om Dance, Mas Glen, Mas Jhonex, Mas Agus, serta teman - teman yang selalu mendukung dalam doa serta dorongan dan semangat kepada Penulis selama masa studi sampai pada penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena keterbatasan yang ada. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala keterangan yang ada. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Disamping itu penulis juga sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik saran yang bersifat membangun,penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis secapa khusus maupun bagi pembaca pada umumnya.

Daftar Isi Tesis

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi	ii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji	iii
Surat Pernyataan	iv
Ringkasan	v
Abstrak	vii
Abstract	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Tinjauan Pustaka.....	11
1.5.1. Tinjauan Umum tentang Notaris	11
1.5.2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris Dalam pembuatan Akta	14
1.5.3. Tinjauan Mengenai Honaririum	20
1.5.4. Asas Kebebasan Berkontrak.....	25
1.5.5. Tinjauan Kode Etik Jabatan Notaris	28
1.6. Orisinalitas Penelitian	33
1.7. Metode Penelitian	37
1.7.1. Tipe Penelitian	37
1.7.2. Pendekatan	38
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	38
1.7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	40
1.7.5. Analisis Bahan Hukum	41
1.8. Sistematika Penulisan.....	42

BAB II PEMBATASAN MAKSIMUM HONORARIUM NOTARIS KOHEREN DENGAN PASAL 1338 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA	44
2.1. Pengaturan Honorarium Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	44
2.2. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	46
2.3. Makna dan Tujuan Pembatasan Honorarium Notaris dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang – undang Hukum Perdata serta Hubungan Normatif antara Pasal 36 Undang – undang jabatan Notaris dan Pasal 1338 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.....	51
2.3.1. Pembatasan Honorarium notaris.....	51
2.3.2. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	56
2.3.3. Hubungan antara Pasal 36 Undang - Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata	60
2.4. Analisis Koherensi antara Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1338 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.....	71
2.5. Implikasi Hukum terhadap Honorarium Notaris	76
BAB III NOTARIS MEMILIKI HAK TAGIH TERHADAP PENGHADAP YANG TIDAK MEMBAYAR HONORARIUM ATAS JASA KENOTARIATAN YANG TELAH DIBERIKAN.....	81
3.1. Dasar Hukum Pemberian Honorarium kepada Notaris.....	81
3.2. Hubungan Perikatan antara Notaris dan Penghadap	86
3.3. Hak Tagih Notaris terhadap Penghadap yang Tidak Membayar Honorarium	88
3.4. Akibat Hukum Tidak Dibayarnya Honorarium terhadap Keabsahan Akta	91
3.5. Konsekuensi Terhadap Notaris yang Tidak Memungut Honorarium Dalam Pembuatan Akta Kepada Para Pihak	94
BAB IV PENUTUP	99
4.1. Kesimpulan	99
4.2. Saran	101
Daftar Pustaka.....	103